
PERMASALAHAN DALAM PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN INKLUSI DI SDN SE KECAMATAN SOKO KABUPATEN TUBAN

Ina Agustin

FKIP Universitas PGRI Ronggolawe Tuban

E-mail: inaagustin88@gmail.com

Abstrak: Penerapan pendidikan inklusi di Indonesia bertujuan untuk memberikan fasilitas dan layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). Penyelenggaraan pendidikan inklusi sudah diterapkan di sekolah dasar seluruh Indonesia khususnya kota-kota besar, tetapi dalam pelaksanaannya menemukan banyak permasalahan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan permasalahan-permasalahan yang dialami oleh sekolah penyelenggara pendidikan inklusi di SD Negeri Se Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Subjek dalam penelitian ini adalah: Guru Pembimbing Khusus (GPK), guru kelas, kepala Sekolah di SD Negeri inklusif se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Data yang diperoleh dari penelitian ini berupa data kualitatif yang kemudian dianalisis melalui kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan ada berbagai permasalahan yang di temukan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, yaitu dari komponen guru, siswa, proses pembelajaran, manajemen sekolah, kurikulum, sarana prasarana, dan kerjasama. Permasalahan utama berkaitan dengan kurangnya kompetensi guru dalam menghadapi siswa ABK, minimnya kemampuan guru dalam proses pembelajaran, belum tersedianya ruang sumber untuk pemberian layanan khusus bagi ABK, belum adanya kurikulum plus, dan berbagai jenis ABK yang memiliki keberagaman karakteristik. Permasalahan lainnya adalah berkaitan dengan kurangnya kepedulian orang tua terhadap ABK dan kurangnya kerjasama dari berbagai pihak seperti masyarakat, ahli profesional dan pemerintah.

Kata kunci: Permasalahan, Pendidikan Inklusi, Anak Berkebutuhan Khusus

Abstract: The application of inclusive education in Indonesia aims to provide educational facilities and services for children with special needs (ABK). The implementation of inclusive education has been implemented in primary schools throughout Indonesia, especially in big cities, but in its implementation there have been many problems. This study aims to describe the problems experienced by schools providing inclusion education in the Public Elementary Schools in Soko Sub-District, Tuban Regency. Subjects in this study were: Special Advisors (GPK), Class teachers, headmaster all state Elementary Schools inclusive of Soko sub-district, in Tuban Regency. Data was collected through interview, observation, documentation techniques. The data obtained from this study are qualitative data which are then analyzed through data reduction activities, data presentation and conclusion drawing. The results showed that there were various problems found in the implementation of inclusive education, namely from the components of the teacher, students, the learning process, school management, curriculum, infrastructure, and collaboration. The main problem is related to the lack of competency of teachers in dealing with ABK students, the lack of teachers' ability in the learning process, the unavailability of source space for providing special services for ABK, the absence of a plus curriculum, and various types of crews who have diverse characteristics. Other problems are related to the lack of awareness of parents to ABK and the lack of cooperation of various parties such as professional government and society.

Keywords: Problems, Inclusion Education, Children with Special Needs

PENDAHULUAN

Manusia membutuhkan pendidikan dalam menjalani kehidupannya. Pendidikan akan mampu membuat manusia bertahan dan berkembang. Mendapatkan pendidikan merupakan hak bagi semua manusia tidak terkecuali untuk anak berkebutuhan khusus (ABK). Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional yang didalamnya mengamanatkan tujuan dan fungsi pendidikan, termasuk sistem pendidikan untuk Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Dari undang-undang ini maka hadir berbagai peraturan tentang pendidikan salah satunya Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang mencakup delapan (8) standar. Inti kebijakan ini adanya sistem pendidikan yang bersifat umum sebagai tolak ukur minimal kualitas layanan pendidikan. Implementasi dari kebijakan tersebut diharapkan setiap layanan pendidikan dapat mencapai ketuntasan minimal.

Secara konseptual pendidikan inklusif merupakan sistem layanan Pendidikan Luar Biasa (PLB) yang mempersyaratkan agar semua ABK dilayani di sekolah umum terdekat bersama teman seusianya. Hal ini senada dengan pernyataan Ilahi, (2013: 26) bahwa pendidikan inklusif yaitu sistem layanan pendidikan yang mengikutsertakan anak berkebutuhan khusus belajar bersama dengan anak sebayanya di sekolah reguler yang terdekat dengan tempat tinggalnya.

Dalam proses penyelenggaraan pendidikan inklusif terdapat komponen yang saling terkait agar mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. Komponen pertama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah tenaga pendidik. Tenaga pendidik yang dimaksud adalah guru kelas, guru mata pelajaran dan guru pembimbing khusus (GPK). Tenaga pendidik tersebut merupakan orang yang sangat berpengaruh terhadap ketercapainya tujuan suatu pendidikan. Dengan berbagai tugas dan peran dari tenaga pendidik maka diharapkan akan mampu memberikan teladan kepada ABK dan juga mengarahkan sesuai dengan potensi dan bakat yang dimiliki.

Komponen kedua dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi adalah adanya kurikulum yang fleksibel atau disesuaikan dengan kebutuhan ABK karena hambatan dan kemampuan yang dimilikinya bervariasi. Menurut Kustawan, (2012: 59) kurikulum yang fleksibel adalah kurikulum yang mengakomodasi peserta didik dengan berbagai latar belakang kemampuan dengan cara eskalasi, duplikasi, modifikasi, omisi dan substitusi.

Komponen ketiga adalah penerapan proses pembelajaran dengan strategi yang beragam. Proses pembelajaran yang meliputi metode, media, dan sumber belajar harus disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan ABK. Guru dalam melaksanakan proses pembelajaran harus mampu melakukan pengelolaan kelas dan mengelola pembelajaran serta pemahaman terhadap ABK yang mempunyai ragam perbedaan.

Komponen pendukung dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif yaitu aksesibilitas sarana dan prasarana sehingga dapat memudahkan penggunaannya baik peserta didik normal ataupun peserta didik berkebutuhan khusus. Komponen selanjutnya adalah kerja sama. Kerjasama sekolah dengan orang tua ABK serta kerjasama sekolah dengan lembaga lain harus ada di sekolah penyelenggara pendidikan inklusif dikarenakan dengan adanya kerja sama, maka proses penyelenggaraan pendidikan inklusif dapat berjalan dengan baik.

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti terkait dengan surat keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Tuban tahun 2016 terdapat 41 SD Inklusi dan 57 Guru Pembimbing Khusus (GPK) di sekolah inklusi tersebut. SD Negeri Se Kecamatan Soko yang menyelenggarakan pendidikan inklusi meliputi SDN Bangunrejo II, SDN Prambon Tergayang II, SDN Sokosari I, SDN Tluwe dan SDN Jegulo III

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara kepada guru, kepala sekolah dan guru pembimbing khusus di SD Negeri Se Kecamatan Soko dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif masih banyak mengalami persoalan seperti: Sumber Daya Manusia dalam menjalankan tugas dan peran dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi, terbatasnya fasilitas dan sarana prasarana, serta penanaman yang kurang kepada siswa lain untuk dapat menerima ABK.

Peneliti tertarik untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan masalah-masalah apa saja yang dihadapi sekolah khususnya terkait dengan penyelenggaraan pendidikan inklusi. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan kontribusi bagi dunia pendidikan khususnya sekolah penyelenggara pendidikan inklusi lainnya, psikologi pendidikan, pemerintah dan masyarakat yang bergerak dan mendalami dunia pendidikan inklusif di tingkat SD. Harapannya kendala-kendala atau hambatan-hambatan tersebut dapat dipetakan sesuai karakteristiknya sehingga dalam kesempatan berikutnya dapat dilakukan intervensi yang sesuai agar tujuan pendidikan dapat dicapai.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (*descriptive research*). Menurut Arikunto, (2005: 234) penelitian deskriptif hanya bermaksud menggambarkan atau menerangkan gejala, tidak dimaksudkan untuk menguji hipotesis. Penelitian ini dipilih oleh peneliti karena peneliti bermaksud mendeskripsikan, menguraikan, mengidentifikasi dan menggambarkan permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif di SD Negeri Se Kecamatan Soko.

Subjek dalam penelitian ini adalah: (1) Guru Pembimbing Khusus (GPK) di SD Negeri se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban; (2) Guru Kelas di SD Negeri se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban; dan (3) Kepala Sekolah Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. SD Negeri Se Kecamatan Soko yang menyelenggarakan pendidikan inklusi meliputi SDN Bangunrejo II, SDN Prambon Tergayang II, SDN Sokosari I, SDN Tluwe dan SDN Jegulo III.

Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi, dokumentasi. Oleh karena itu instrumen yang digunakan dalam penelitian ini berupa pedoman wawancara, pedoman dokumentasi, dan pedoman observasi. Pedoman wawancara yaitu untuk Guru Pembimbing Khusus (GPK), Guru Kelas dan Kepala Sekolah Inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Pedoman Observasi digunakan untuk melihat kondisi sarana prasarana dan proses belajar mengajar. Pedoman dokumentasi dimaksudkan untuk melihat arsip lembaga dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini merupakan data kualitatif sehingga teknik analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh kemudian dianalisis melalui kegiatan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Reduksi data yang dilakukan yaitu memilih data-data penelitian dari hasil observasi dan wawancara berdasarkan tiap sumber, kemudian data tersebut dimasukkan dalam kategori sesuai fokus permasalahan yakni permasalahan dan solusi sekolah mengatasi permasalahan pengelolaan pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban. Penyajian data dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori yaitu permasalahan dan solusi dalam mengatasi masalah dalam pengelolaan pendidikan inklusif. Berikutnya terkait dengan penarikan kesimpulan merupakan deskripsi atau gambaran akhir

yang didapatkan dari proses penelitian ini yaitu mengenai permasalahan dalam pengelolaan pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inkluf di kelompokkan berdasarkan komponen di bawah ini.

1. Tenaga Pendidik (Guru)

Tenaga pendidik memiliki peran yang penting dalam menyelenggarakan pendidikan inklusif, yaitu dengan memberikan pelayanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus. Tenaga kependidikan dalam setting inklusif diantaranya yaitu kepala sekolah, guru, guru pembimbing khusus, dan TU. Tenaga kependidikan yang paling berperan yaitu guru, di mana dalam pendidikan inklusif di tingkat SD ada dua guru yaitu guru kelas dan guru pembimbing khusus. Antar guru harus saling bekerja sama dalam memberikan pendidikan agar tujuan pendidikan inklusif dapat tercapai.

Dalam pengelolaan pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, ada beberapa masalah terkait dengan tenaga kependidikan. Permasalahan tersebut diantaranya:

- a. kurangnya jumlah guru pembimbing khusus di bandingkan dengan jumlah ABK dalam sekolah inklusif;
- b. kurangnya kompetensi guru pembimbing khusus dalam menangani ABK yang meliputi kesulitan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), kurangnya pemahaman guru tentang ABK, latar belakang pendidikan guru yang tidak sesuai dengan kualifikasi GPK, dan;
- c. beban administrasi yang semakin berat bagi GPK, baik dari kegiatan asesmen yang harus dilakukan secara berkala maupun bentuk evaluasi yang beragam sesuai dengan karakteristik ABK.

2. Peserta didik

Permasalahan yang berkaitan dengan siswa meliputi:

- a. ABK dengan permasalahan berbeda dan memerlukan penanganan yang berbeda dan terdapat dalam satu kelas akan menjadi kendala dan kesulitan tersendiri bagi GPK dalam melakukan pelayanan;

-
- b. ABK mengalami Kesulitan mengikuti materi pelajaran, hal ini dikarenakan kemampuan akademik bagi ABK yang jauh tertinggal dengan anak reguler sehingga perlu adanya banyak penyesuaian;
 - c. sikap ABK yang belum bisa mengikuti aturan sehingga dapat mengganggu proses KBM, dan;
 - d. permasalahan siswa reguler terhadap ABK terkait dengan kurangnya rasa empati dan peduli terhadap kekurangan yang dimiliki oleh anak ABK.

3. Manajemen sekolah

Manajemen sekolah yang baik akan dapat memberikan pengaruh yang baik kepada sekolah dan diharapkan dapat mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Permasalahan dalam manajemen sekolah diantaranya:

- a. perencanaan pengelolaan pendidikan inklusi yang belum sepenuhnya melibatkan guru dan personel lainnya;
- b. pengorganisasian dalam pembagian tugas belum dijalankan secara maksimal oleh guru yang menerima tugas dan pengawasan kegiatan atau program belum terjadi secara menyeluruh;
- c. belum siapnya sekolah dengan program sekolah inklusi baik dari segi administrasi dan SDM, dan;
- d. proses KBM yang belum berjalan maksimal, selama ini ABK belum mendapatkan pelayanan khusus dan program khusus dari sekolah dalam hal pengembangan potensi.

4. Kurikulum

Pengelolaan pendidikan inklusif di SD Negeri se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban menggunakan kurikulum nasional yang di pakai sekolah pada umumnya, hal ini karena guru pembimbing khusus masih kesulitan dalam pengembangan kurikulum plus yang disesuaikan dengan kemampuan anak berekbutuhan khusus, sehingga dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif masih belum efektif.

5. Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran di SD Negeri se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban dalam setting inklusif yaitu dengan menggabungkan peserta didik normal dengan anak berkebutuhan khusus dalam satu kelas secara bersamaan. Dalam proses pembelajarannya karena belum adanya guru pembimbing khusus, guru kelas menangani peserta didik secara keseluruhan. Oleh karena itu guru kerepotan dalam menangani peserta didik. Dalam proses

pembelajaran, proses pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus masih belum maksimal, pembelajaran masih dicampur dengan anak normal lainnya, hal tersebut menyebabkan keributan antara anak berkebutuhan khusus dan anak normal. Selain itu kemampuan.

6. Sarana prasarana

SD Negeri Se Kecamatan Soko yang menyelenggarakan pendidikan inklusi meliputi SDN Bangunrejo II, SDN Prambon Tergayang II, SDN Sokosari I, SDN Tluwe dan SDN Jegulo III merupakan sekolah inklusif yang didalamnya terdapat beragam peserta didik dengan masing-masing kebutuhan yang berbeda sehingga dalam pengelolaannya sekolah harus menyiapkan sarana prasarana dan aksesibilitas yang mendukung untuk tercapainya tujuan sekolah.

Beberapa masalah sarana prasana adalah belum tersedianya ruangs sumber bagi ABK, tidak sesuainya sarana prasarana yang dimiliki oleh sekolah dengan kebutuhan ABK misalnya media pembelajaran dan alat peraga yang sesuai dengan kebutuhan.

alat pembelajaran untuk anak berkebutuhan khusus

7. Kerjasama

Komponen kerjasama yang di maksud adalah kerjasama yang terjalin antara sekolah penyelenggara pendidikan inklusi dengan dinas (pemerintah) dan orang tua peserta didik. Permasalahan kerjasama dengan dinas terkait yaitu belum ada penugasan guru SLB dari dinas untuk dijadikan GPK ke sekolah penyelenggara inklusif akan tetapi hanya penunjukan guru dari sekolah asal untuk menjadi GPK walaupun dengan lulusan yang belum sesuai.

Permasalahan dengan orang tua adalah rendahnya kepedulian orang tua terhadap penanganan anak berkebutuhan khusus, bahkan orang tua terkadang tidak mau tau terkait dengan program program khusus yang harus dilakukan sebagai upaya pemberian layanan pada anak ABK.

Permasalahan yang muncul dari masing masing komponen bila dikaji lebih lanjut akan saling berhubungan dan memberikan dampak yang berbeda-beda. Pertama terkait permasalahan guru. Kualifikasi guru pembimbing khusus yang bukan dari lulusan pendidikan luar biasa juga berdampak pada kurangnya kemampuan guru dalam memberikan layanan pada ABK, contohnya kesulitan guru dalam melakukan pengembangan perangkat pembelajaran individual dan kegiatan belajar mengajar.

Kesulitan Pengelolaan administrasi maupun terbatasnya kemampuan dalam pengembangan media yang sesuai dengan kebutuhan ABK juga memberi dampak pada bagaimana guru menangani siswa di sekolah menjadi tidak maksimal.

Beban guru semakin berat dalam memberikan layanan kepada ABK, ketika dipengaruhi oleh komponen sarana prasarana yang kurang mendukung seperti belum tersedianya ruang sumber bagi ABK dan belum adanya kurikulum plus sebagai hasil pengembangan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan ABK. Hal ini sesuai dengan pernyataan Kustawan, (2013: 130) tugas guru pembimbing khusus (GPK), Memberikan bantuan dalam pengembangan kurikulum, program pendidikan individual, pembelajaran, penilaian, media, dan sumber belajar serta sarana dan prasarana yang aksesibilitas. Komponen berikutnya berkaitan dengan kerjasama pemerintah atau dinas terkait yang belum terjalin dengan baik dan para orang tua yang sangat pasif dalam membentuk kerjasama guna memberikan layanan pada ABK.

Keberhasilan penyelenggaraan sekolah inklusi dipengaruhi oleh keberhasilan dari berbagai komponen dan semua pihak yang terlibat. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh Giangreco (2013) sekolah juga harus bekerjasama dengan komunitas sekolah seperti guru, guru pendamping kelas, orangtua, siswa, tim administratif sekolah, dan komunitas sekolah untuk memaksimalkan kinerja guru.

Budiyanto (2009:13) mengatakan bahwa guru dituntut melakukan kolaborasi dengan profesi atau sumberdaya lain dalam perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Untuk melakukan kegiatan tersebut, harus ada kerjasama dengan komponen lain misalnya adanya manajemen sekolah yang efektif dan efisien. Manajemen sekolah dalam setting inklusif menurut Marthan, (2007: 145) yaitu proses keseluruhan kegiatan bersama dalam bidang pendidikan inklusif yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, pengelolaan dan evaluasi dengan menggunakan dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia, baik personel, material, maupun spiritual untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien

Harapan peneliti, bahwa kedepan peneliti lain bisa berfokus pada penyelesaian permasalahan yang berkaitan dengan masing masing komponen secara umum. Khususnya dari komponen guru yaitu berkenaan dengan peningkatan pemahaman dan kompetensi guru.

Pemerintah memiliki tanggung jawab penuh untuk meningkatkan keprofesionalan guru walaupun terkadang masih tanggung jawab tersebut diserahkan kepada lembaga

sekolah. Pemerintah juga harus mampu mengajak dan membangun kerjasama yang baik dengan masyarakat untuk meningkatkan kepedulian sosial masyarakat terhadap adanya sekolah inklusi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan permasalahan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi di SD Negeri se-Kecamatan Soko Kabupaten Tuban adalah terkait dengan komponen tenaga pendidik yang terdiri dari guru kelas dan guru pembimbing khusus (GPK), peserta didik, manajemen sekolah, kurikulum, proses pembelajaran, kerjasama, dan kurangnya sarana prasarana yang mendukung pelaksanaan sekolah inklusi. Permasalahan yang muncul juga dikarenakan kurang adanya kerjasama dari berbagai pihak misalnya dengan pemerintah atau dinas terkait dan dengan orang tua wali murid.

Komponen utama dalam penyelenggaraan pendidikan inklusif adalah guru. Pemerintah dan lembaga terkait harus berkomitmen untuk meningkatkan kemampuan guru dalam memberikan pelayanan bagi ABK, agar mampu dalam melaksanakan proses pembelajaran yang efektif, mengembangkan media pembelajaran sesuai kebutuhan ABK, mampu mengembangkan kurikulum plus sesuai dengan kemampuan ABK dan mampu membentuk kerjasama yang baik dengan orang tua. Hal ini juga di dukung dengan kemampuan lembaga sekolah dalam menjalin kerjasama dengan dinas terkait/ pemerintah, menyiapkan sarana prasarana yang mendukung sehingga mampu memberikan layanan yang terbaik pada ABK.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Budiyanto, dkk & TIM MCPM-AIBEO. 2009. *Modul Training of Trainers Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Depdiknas DIY. 2011. *Monitoring Pendidikan Inklusif, belum optimal*. <http://www.pendidikan-diy.go.id>

-
- Giangreco, M.F. 2013. Teacher Assistant Supports in Inclusive Scholls: Research, Practices and Alternatives. *Australasian Journal of Special Education*. Vol 37. Issue 2 : 93-106. Doi:10.1017/jse.2013.1.
- Illahi, Takdir. 2013. *Pendidikan Inklusif konsep dan aplikasi*. Yogyakarta: AR Ruzz Media.
- Kustawan, Dedy. 2012. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta timur: PT Luxima Metro Media.
- Kustawan, Dedy dan Yani Meimulyani. 2013. *Mengenal pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus serta implementasinya*. Jakarta Timur: PT Luxima Metro Media.
- Marthan, Lay Kekeh. 2007. *Manajemen Pendidikan Inklusif*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, Direktorat Ketengaan.